

# OPTIMALISASI ALOKASI BELANJA MODAL DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Henok Madai

NPP: 30.1477

*Asdaf Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [henokmadai@gmail.com](mailto:henokmadai@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina, SE, M.Si

## ABSTRACT

**Problems:** Availability of limited capital expenditure budget and the number of work programs in the priorities for accelerating the development of regional Infrastructure in Nabire Regency thus regional financial management carried out by the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) must be carried out optimally so that the availability of regional development budgets can be budgeted optimally evenly distributed, especially for the capital expenditure budget in accordance with regional development priorities. **Purpose:** this study looks at how optimal the capital expenditure budget is and what steps are taken in priority to accelerate infrastructure development in Nabire Regency, Central Papua Province. **Method:** This study used a qualitative descriptive research method by conducting interviews with informants and conducting documentation at the office of the Regional Financial and Asset Management Agency in Nabire district. **Result:** The results of this study indicate that the management of the capital expenditure budget as a whole is not optimal due to the efforts made by BPKAD. Can be explained using Siringoringo's theory (2005:5) which explains the concept of optimization based on objectives, decision alternatives, and limiting resources. Obstacles found were immature planning, not optimal employee performance, and a large number of Nabire district employees. The efforts are careful planning, increasing human resources, and moving the number of employees to the provincial capital with the presence of the Central Papua Province autonomous region. **Conclusion:** Optimization of the capital expenditure budget in increasing infrastructure development by BPKAD Nabire district as a whole can be said to be quite optimal.

**Keywords:** Optimization, Capital Expenditures, Infrastructure.

## ABSTRAK

**Permasalahan:** Ketersediaan anggaran belanja modal yang terbatas dan banyaknya program kerja dalam prioritas percepatan pembangunan Infrastruktur daerah Kabupaten Nabire dengan demikian pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus dilakukan secara optimal sehingga ketersediaan anggaran pembangunan daerah dapat dianggarkan secara merata terutama untuk anggaran belanja modal sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. **Tujuan:** penelitian ini melihat bagaimana optimalnya anggaran belanja modal dan langkah apa saja yang diambil dalam prioritas percepatan pembangunan

infrastruktur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan dan melakukan dokumentasi di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Nabire. **Hasil Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran belanja modal secara keseluruhan belum optimal dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh BPKAD. Dapat dijelaskan menggunakan teori Siringoringo (2005:5) yang menjelaskan konsep optimalisasi berdasarkan tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang membatasi. Hambatan yang ditemukan yaitu perencanaan belum matang, kinerja pegawai belum maksimal, dan jumlah pegawai kabupaten nabire yang banyak. Adapun upaya yaitu perencanaan secara matang, Meningkatkan SDM, dan Pemindahan jumlah pegawai ke Ibukota Provinsi dengan adanya DOB Provinsi Papua Tengah. **Kesimpulan:** Optimalisasi anggaran belanja modal dalam peningkatan pembangunan infrastruktur oleh BPKAD kabupaten nabire secara keseluruhan dapat dikatakan cukup optimal. **Kata Kunci:** Optimalisasi, Belanja Modal, Infrastruktur.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu dari negara dengan kemajemukan yang tinggi. pelaksanaan pembangunan nasional melalui potensi segala sumber daya yang dimiliki, yang akan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat di Indonesia. Diantara tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Percepatan pembangunan nasional di pemerintah daerah dilaksanakan melalui adanya desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Adanya desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tujuan agar Pemerintah Daerah dapat mempercepat pembangunan dan meninggalkan ketertinggalan pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah diprioritaskan dalam bentuk peningkatan kesehatan, pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta pengembang sistem jaminan sosial. Salah satu bentuk pembangunan daerah Kabupaten Nabire yaitu dengan meningkatkan infrastruktur. Guna pembangunan infrastruktur, pemanfaatan belanja yang digunakan adalah Belanja Modal.

Pemerintah kabupaten Nabire Khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan belanja modal untuk menyediakan sarana dan prasarana guna percepatan pembangunan ekonomi masyarakat telah menjadi tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nabire guna pembangunan daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam hal mengatur keuangan, sudah sepatutnya penyerenggaraan keuangan dilakukan dengan sebijak mungkin dan optimal dalam segala aspek pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Umum/Khusus, maupun pendapatan lain yang sah untuk belanja modal, agar dapat mengoptimalkan anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur daerah, sebab dana transfer umum maupun khusus saja terbatas dalam mengalokasikan

pada belanja modal. Karena dengan optimalnya anggaran belanja modal akan mendorong pembangunan infrastruktur dengan cepat dan baik, sehingga akan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Peneliti)**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah agar seluruh bentuk prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. bentuk prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nabire sebagai pembangunan infrastruktur daerah demikian belanja modal yang dibutuhkan juga besar sedangkan anggaran belanja modal yang telah tersedia terbatas. Untuk dapat mengoptimalkan anggaran belanja maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire harus mampu mengatur dan mengelola keuangan yang tersedia di kas daerah dengan baik. Di lain sisi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nabire oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, dengan demikian beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah:

1. Keterbatasan anggaran belanja modal yang masih minim
2. Banyaknya program kerja daerah
3. Kemampuan Keuangan daerah
4. Kinerja Pegawai yang belum maksimal dalam mengelola keuangan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire untuk mengetahui lebih dalam bagaimana langkah pemerintah daerah Kabupaten Nabire dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur atas pembiayaan alokasi belanja modal dengan judul: Optimalisasi Alokasi Belanja Modal Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Sholikhah, Imroatus, dan Agus Wahyudin (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif Hasil Penelitian ini berkesimpulan bahwa Variabel PAD, DBH, dan luas wilayah daerah berpengaruh terhadap jumlah anggaran belanja modal.

Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal kabupaten Nagan Raya. Metode dalam penelitian ini menggunakan Penelitian kuantitatif deskriptif. Data sekunder penelitian memperoleh data lewat catatan, dokumen, dan artikel terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Setiap kenaikan (PAD) 1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,752% dan belanja modal pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebesar 86,4 % dipengaruhi oleh (PAD).

Agung Priambodo (2015). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Deskriptif. Pendapatan Asli Daerah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Juniawan, Made Ari, dan Ni Putu Santi Suryantini (2018). Pengaruh Pad, Dau dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota/Kabupaten di Provinsi Bali. Menggunakan Metode Kuantitatif dengan uji asumsi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali dalam meningkatkan infrastruktur berupa fasilitas umum.

Akhlis Priya Pambudy, Muhamad Imam Syairozi (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat. Metode penelitian Kuantitatif data yang digunakan data sekunder. Hasil Temuan membahas a). Belanja modal berpengaruh signifikan dengan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia. b). Investasi swasta berpengaruh signifikan dengan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Perbedaan dengan penelitian ini dengan berfokus pada bagaimana pengelolaan keuangan daerah anggaran belanja modal dan langkah yang diambil agar teroptimalnya anggaran belanja modal atas ketersediaannya yang terbatas oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini sangat penting karena misi poin pertama dari kepala daerah adalah prioritas pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Nabire. Kemudian Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah ketersediaan anggaran belanja modal atas kontribusi positifnya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap pegawai.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang ingin diketahui oleh penulis adalah mengetahui bagaimana langkah yang diambil untuk mengoptimalkan alokasi anggaran belanja modal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah khususnya pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Sehingga hasil pembahasan juga akan berbeda sesuai dengan penelitian ini. Hadirnya penelitian ini sebab penulis menilai belum optimalnya alokasi anggaran belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

## **II. METODE**

Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif. Suatu penelitian memerlukan penyelidikan dalam pemecahan masalah dan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Bogdan & Biklen (1992: 21) mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur, maksudnya sudah menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan wawancara. Dan dokumentasi, dokumentasi memiliki keunggulan karena relatif murah, hemat waktu dan energi. Menggunakan proses analisis data interaktif, analisis data dengan proses yang dilakukan antar komponen, dalam bentuk siklus. Pada tahapan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam menganalisis optimalisasi alokasi belanja modal dalam pembangunan infrastruktur Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Optimalisasi Alokasi Belanja Modal Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

##### 1. Tujuan

##### A. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran Belanja Modal Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.

Penjelasan yang disampaikan dalam lingkup mengoptimalkan anggaran belanja modal oleh BPKAD belum optimal dikarenakan banyaknya program kerja menyangkut anggaran belanja modal dari setiap Organisasi Perangkat Daerah sementara ketersediaan anggaran belanja modal belum memadai dan belum dapat menjamin seluruh program kerja. Sehingga rencana penganggaran tiap opd akan berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

##### B. Meminimalisir Biaya Pengeluaran Lain

Penjelasan yang diberikan adalah pada saat melaksanakan pencairan anggaran ke setiap OPD, dalam hal meminimalisir anggaran biaya dilakukan perencanaan terlebih dahulu bersama bapak kepala BPKAD, kemudian pencairan anggaran biaya dilaksanakan. Anggaran seperti biaya belanja operasional, biaya makan minum rapat, perjalanan dinas dikurangi 5% karena bukan prioritas pembangunan daerah, hanya saja sebagai unsur penunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel. 1**  
Belanja Operasional Kabupaen Nabire Tahun Anggaran 2022

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Pegawai	435.954.873.782
Belanja Barang dan Jasa	359.433.399.535
Belanja Bunga	5.400.000.000
Belanja Hibah	86.619.537.001
Belanja Bantuan Sosial	56.797.010.203
<b>Total</b>	<b>994.115.820.521</b>

*Sumber: APBD Kabupaten Nabire, Diolah Penulis 2023*

Terjadi pemotongan anggaran belanja operasional seperti tunjangan makan, minum karena bukan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nabire. Jumlah dari total diatas sebesar Rp. 994.115.820.521 akan mengalami pengurangan jumlah dan jumlah yang dipotong tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan daerah yang lain sesuai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nabire.

### C. Ketersediaan Anggaran Belanja Modal Yang Memadai

ketersediaan anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur tidak memadai jika dibandingkan dengan seluruh program kerja pembangunan daerah. Dapat dikatakan hanya sekitar 60% yang dapat direalisasikan untuk mendanai rencana kerja pembangunan infrastruktur.

**Tabel. 2**  
Jumlah Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Nabire Tahun 2020-2022

<b>Belanja Modal</b>	<b>2020 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2022 (Rp)</b>
Belanja Tanah	25.090.604.160	1.174.507.223	22.898.830.000
Belanja Peralatan dan Mesin	6.126.437.500	10.887.552.798	33.847.819.510
Belanja Gedung dan Bangunan	88.231.457.956	38.843.912.552	60.123.671.005
Belanja jalan, Irigasi, dan Jaringan	63.181.161.150	85.456.785.992	80.325.956.542
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.540.000	500.000	500.000
<b>Total</b>	<b>245.828.869.286</b>	<b>134.289.934.965</b>	<b>197.196.777.057</b>

*Sumber: APBD Kabupaten Nabire, Diolah Oleh Penulis 2023*

Jumlah ketersediaan anggaran belanja modal tiga tahun terakhir di Tahun 2020 ketersediaan belanja modal memadai kemudian mengalami penurunan dan di Tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan.

## 2. Alternatif Keputusan

### A. Prioritas Peningkatan Anggaran Belanja Modal

Upaya peningkatan alokasi belanja modal oleh BPKAD telah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal dari anggaran SiLPA, DTI dan belanja transfer antar daerah sehingga terjadi peningkatan yang signifikan terhadap ketersediaan anggaran belanja modal. Sehingga seminimal mungkin dapat menunjang teroptimalnya ketersediaan anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur daerah.

**Tabel. 3**  
Alokasi Anggaran Dalam Peningkatan Belanja Modal Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Sumber dana</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	8.130.500.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	156.477.329.348
3	SiLPa	35.406.500.593
	<b>Total</b>	<b>200.014.329.941</b>

*Sumber: BPKAD Kabupaten Nabire, Diolah Oleh Penulis 2023*

Terjadi peningkatan anggaran belanja modal sebesar Rp. 200.014.329.941 digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik berupa jalan, jembatan, jaringan dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan menunjang prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan Misi poin pertama Bapak Bupati Mesak Magai sebagai prioritas pembangunan infrastruktur demi membuka isolasi daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## B. Mengelola Anggaran Belanja Modal Secara Optimal

Ketersediaan anggaran belanja modal yang terbatas, BPKAD dalam hal ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan terutama belanja modal dengan semaksimal mungkin yang memperhatikan prioritas pembangunan. sehingga BPKAD telah menerima WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tiga tahun berturut-turut.

**Tabel. 4**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2022 Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

<b>Belanja Modal</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran(Rp)</b>	<b>Realisasi(Rp)</b>	<b>Presentase</b>
2020	245.828.869.286	196.465.254.723	79.92%
2021	134.289.934.965	90.677.534.190	67.52%
2022	197.196.777.057	134.185.921.051	68.05%

*Sumber: APBD Kabupaten Nabire, Diolah Oleh Penulis 2023*

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran belanja modal yang terbatas, maka pengalokasian anggaran belanja modal diutamakan dengan prioritas pembangunan kabupaten Nabire yaitu pembangunan infrastruktur seperti rekontruksi jalan raya dalam kota maupun di sekitaran distrik, rekontruksi jembatan, rehabilitasi muara Sungai. Sehingga prioritas pembangunan infrastruktur dapat dijalankan terlebih dahulu dalam Tahun anggaran 2022.

## C. Meningkatkan Kemampuan Pegawai dalam Mengelola Keuangan

Pelaksanaan peningkatan kinerja, pengetahuan keterampilan pegawai di kantor BPKAD Kabupaten Nabire dalam mengelola keuangan daerah telah dilakukan sebagai contoh pelaksanaan Bimbingan Teknis yang telah dilakukan oleh beberapa perwakilan pegawai BPKAD guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai agar lebih profesional dalam mengelola keuangan daerah.

**Tabel. 5**

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Oleh Pegawai BPKAD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Bimtek</b>	<b>Tempat</b>	<b>Hari/tanggal</b>
Ricsal Siera Warinussy NIP. 1993092420170510001	Staf Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Hotel Swss- Panakkukang - Makassar	Kamis-Minggu, 08-11 Desember 2022
Abdul Hanif Dzulfikar, S,Kom NIP. 199212092021061001	Staf Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Hotel Swss- Panakkukang - Makassar	Kamis-Minggu, 08-11 Desember 2022
I Wayan Resta Wispramana, SE NIP. 199602012021061001	Staf Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Hotel Swss- Panakkukang - Makassar	Kamis-Minggu, 08-11 Desember 2022
Osmin Tabuni NIP. 199305032020122001	Staf Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Hotel Swss- Panakkukang - Makassar	Kamis-Minggu, 08-11 Desember 2022

*Sumber: BPKAD Kabupaten Nabire, Diolah Oleh Penulis 2023*

Peningkatan kinerja pegawai dan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan secara profesional di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire dilakukan dengan melaksanakan apel pagi dan apel siang, Pemotongan Tunjangan makan/minum, Pemberian Pemahaman, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Pelaksanaan Bimbingan Teknis.

### 3. Sumber Daya Yang Membatasi

#### A. Kemampuan Keuangan Daerah

Peraturan daerah kabupaten nabire nomor 31 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bab iii bagian ke 3 pasal 32 dan 33 menyatakan: Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

**Tabel. 6**  
Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022

No	Pendapatan daerah	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan asli daerah (PAD)	74.842.219.949
2	Pendapatan transfer	1.167.075.972.597
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	93.682.469.516
<b>Total</b>		<b>1.335.600.662.062</b>

*Sumber: APBD Kabupaten Nabire 2022*

Tingkat kemampuan keuangan daerah besar namun karena banyaknya program kerja sehingga anggaran belanja yang digunakan pun harus sesuai prioritas. Misalkan di Kabupaten Nabire lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur sehingga lebih banyak anggaran belanja modal yang masuk di program percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga perlu adanya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat membiayai rencana kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di kota maupun desa.

#### B. Sumber Daya Manusia

Kinerja suatu pegawai pada dasarnya dipengaruhi oleh sumber daya manusia, apabila SDM pegawai tersebut baik maka kinerja pegawai tersebut juga baik. Sumber daya manusia juga dapat dikatakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja pegawai di kantor manapun ditempati, peningkatan SDM sudah seharusnya dilakukan di setiap segi kehidupan manusia.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pegawai di kantor BPKAD kabupaten Nabire dapat dikatakan kinerjanya belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam mengelola keuangan dan akhirnya mempengaruhi kinerja pegawai. Sebagai contohnya: adanya keterlambatan penginputan data laporan RKA ke SIPD karena belum menguasai penggunaan SIPD tersebut.



### **3.2 Faktor- faktor Penghambat Alokasi Anggaran Belanja Modal**

- a. Keterlambatan perencanaan alokasi anggaran belanja modal
- b. Kinerja Pegawai yang masih belum maksimal
- c. Jumlah pegawai yang banyak di Kabupaten Nabire

### **3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Ada**

- a. Pelaksanaan Perencanaan Secara Matang Dalam Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan merencanakan anggaran belanja modal disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah kemudian melaksanakan pencairan berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- b. Memaksimalkan Kinerja Pegawai Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis (Bimtek).
- c. Memindahkan Sebagian Pegawai Menjadi Pegawai Provinsi dengan adanya Daerah Pemekaran Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, akan memindahkan sejumlah pegawai di Kabupaten Nabire menjadi pegawai Provinsi Papua Tengah.

### **3.4 Diskusi temuan utama**

Perbandingan antara penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang anggaran belanja modal yang dimana menyimpulkan bahwa luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan oleh anggaran belanja modal.

Kemudian pada penelitian ini mengenai bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan ketersediaan anggaran belanja modal oleh BPKAD Kabupaten Nabire atas pembangunan infrastruktur. yaitu dengan prioritas peningkatan anggaran belanja modal, mengelola anggaran yang tersedia dengan optimal, dan meningkatkan kinerja Pegawai di kantor BPKAD Kabupaten Nabire.

Dapat dilihat bahwasannya PAD, DAU, DAK, DTI, sangat mempengaruhi ketersediaan anggaran belanja modal dan ketersediaan anggaran belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Berdasarkan penelitian Penulis menemukan kurangnya kedisiplinan pegawai kemudian hal ini mempengaruhi kinerja pegawai yang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di BPKAD selalu tidak tepat sasaran. Dan jumlah pegawai Kabupaten Nabire yang banyak sehingga jumlah keuangan daerah cenderung lebih banyak dianggarkan untuk belanja operasional.

## **IV. KESIMPULAN**

Optimalisasi Alokasi Belanja Modal Dengan Tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di BPKAD Kabupaten Nabire secara keseluruhan belum optimal dikarenakan banyaknya program kerja dari setiap organisasi perangkat daerah yang membutuhkan anggaran belanja modal besar sementara ketersediaan anggaran belanja modal di kas daerah masih minim yang belum dapat mendanai seluruh program kegiatan anggaran belanja modal. Faktor Penghambat Optimalisasi Alokasi Belanja Modal yaitu Kurangnya perencanaan penganggaran secara matang dalam pengalokasian anggaran belanja modal di BPKAD. Kinerja Pegawai belum maksimal dalam hal

mengelola keuangan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Dan banyaknya jumlah pegawai di kabupaten nabire sehingga mempengaruhi peningkatan belanja modal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada adalah melalui Pelaksanaan Perencanaan Yang Matang Dalam Mengalokasi Anggaran Belanja Modal. Kemudian meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan Diklat, pelaksanaan Bimtek dan Penegakan disiplin pegawai di kantor BPKAD Kabupaten Nabire.dan mengurangi jumlah pegawai, dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis mengalami kendala pada saat pelaksanaan penelitian di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire seperti sering mengalami keterlambatan ke Kantor karena jarak ke kantor jauh, kemudian dalam penulisan Skripsi masih terdapat banyak kesalahan penulisan yang kemudian penulis memperbaikinya sesuai pedoman penulisan.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Secara sadar penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, maka dari itu dengan segala hormat dan untuk kepentingan kita bersama penulis menyarankan untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian agar dapat melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang optimalnya anggaran belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur oleh BPKAD di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah guna melengkapi dan lebih mendalami lagi penelitian selanjutnya.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Willian Sembor, S.IP, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire dan Kepada Bapak Kristian Boby Barguna, S.STP Selaku Kabid Anggaran beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional; Pemrograman Linear*: Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sondang P. Siagian. (2018). *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*. Penerbit: Alfabeta.
- Efendi Jikwa, Agustinus Salle, P. K. A. L. (2005). *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 2*. 2(2), 1–15.
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *Penelitian*, 5, 37.
- Juniawan, M. A, dan N. P. S. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(1255–1281).
- Priambodo, A. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal 4.1*, 1–9.
- Sholikhah, Imroatus, & Wahyudin, A. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal 3.4*.

Sugiyanta, S. (2016). Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 19.

Susanti Susi, & Heru, F. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1.1*, 183–191.

